



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.3.A.1

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
A. BIDANG PEMANFAATAN HUTAN											
1.	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Pemanfaatan Hasil Hutan; 2. Kayu pada Hutan Produksi; 3. Pemanfaatan jasa lingkungan	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Hutan Produksi	10 Hari	90 Tahun	Seluruh	Menteri
	02122	Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam									
	02111	Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.2

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		hutan produksi	pada hutan produksi;								
	02121	Pemanfaatan kayu hutan alam	4. Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi;								
	02130	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	5. Pemanfaatan Bukan Hutan Produksi;								



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.3**

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			6. Pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi.								
2.	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pemanfaatan Hutan Lindung	10 hari	35 tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.4

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			dung; 2. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung; 3. Pemungutan hasil hutan kayu pada hutan lindung.								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.5

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
3.	16101	Industri penggergajian kayu	1. Peng-olahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan /atau bio-massa kayu men-jadi produk produk kayu	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pengolahan Hasil Hutan Skala Besar	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	Menteri
16102	Industri pengawetan kayu										
16105	Industri partikel kayu dan sejenisnya										
16211	Industri kayu lapis										
16212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk										



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.6**

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		decorative plywood	olahan dengan kapasitas produksi 6.000 m ³ (enam ribu meter kubik) per-tahun atau lebih; 2. Peng-								
	16213	Industri panel kayu lainnya									
	16214	Industri veneer									
	16215	Industri kayu laminasi									
	16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu									
	20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.7

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
	16103	Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya	olahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk - produk olahan hasil Hutan bukan kayu untuk skala usaha								
	16104	Industri pengolahan rotan									
	10611	Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya									
	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk <i>leguminous</i>)									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.8

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk <i>rhizoma</i>)	3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi								
	10616	Industri tepung terigu									
	10621	Industri pati ubi kayu									
	10622	Industri berbagai macam pati palma									
	10629	Industri pati dan produk pati									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.9

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		lainnya	produk								
	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras	- produk kayu olahan dengan kapasitas								
	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung	produksi 6.000 m ³ (enam ribu meter kubik)								
	10633	Industri tepung beras dan tepung jagung	per-								
	10634	Industri pati dan beras	tahun								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.10

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		jagung	atau lebih yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha menengah atau skala usaha								
	10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati									
	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan									
	10424	Industri pelet kelapa									
	10722	Industri gula merah									
	10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirup									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.11

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
	10731	Industri kakao	besar.								
	10779	Industri produk masak lainnya									
	11090	Industri minuman lainnya									
	20131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik									
	20294	Industri minyak atsiri									
	22123	Industri karet remah (<i>crumb rubber</i>)									



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.12

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
4.	16101	Industri penggergajian kayu	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk -	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	Gubernur
	16102	Industri pengawetan kayu									
	16105	Industri partikel kayu dan sejenisnya									
	16211	Industri kayu lapis									
	16212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk <i>decorative</i>									



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.13

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat / Provinsi / Kabupaten / Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		<i>plywood</i>	produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m ³ (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000								
	16213	Industri panel kayu lainnya									
	16214	Industri veneer									
	16215	Industri kayu laminasi									
	16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu									
	20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian									
	16103	Industri pengawetan									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.14

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		rotan, bambu dan sejenisnya	m ³ (enam ribu meter kubik) per-tahun;								
	16104	Industri pengolahan rotan									
	10611	Industri penggilingan gandum dan serealia lainnya	2. Peng-olahan Hasil Hutan bukan kayu men-jadi produk								
	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk <i>leguminous</i>)									
	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan	produk								



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.15

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		sayuran (termasuk <i>rhizoma</i>)	olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku								
	10616	Industri tepung terigu									
	10621	Industri pati ubi kayu									
	10622	Industri berbagai macam pati palma									
	10629	Industri pati dan produk pati lainnya									
	10631	Industri penggilingan									



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.16

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		padi dan penyosohan beras	serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk - produk kayu olahan dengan kapasitas produksi								
	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung									
	10633	Industri tepung beras dan tepung jagung									
	10634	Industri pati beras dan jagung									
	10411	Industri minyak mentah dan									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.17

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		lemak nabati	2.000 m ³								
	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan	(dua ribu meter kubik)								
	10424	Industri pelet kelapa	sampai dengan kurang dari 6.000 m ³								
	10722	Industri gula merah	(enam ribu meter kubik)								
	10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirup	per-tahun								
	10731	Industri kakao									
	10779	Industri produk									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.18

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		masak lainnya	yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.								
	11090	Industri minuman lainnya									
	20131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik									
	20294	Industri minyak atsiri									
	22123	Industri karet remah (<i>crumb rubber</i>)									



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.19

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
5.	16101	Industri penggergajian kayu	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk -	Seluruh	N/A	Rendah	NIB Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	Gubernur
	16102	Industri pengawetan kayu									
	16105	Industri partikel kayu dan sejenisnya									
	16211	Industri kayu lapis									
	16212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.20

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		<i>decorative plywood</i>	produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m ³ (dua ribu meter kubik) per-tahun;								
	16213	Industri panel kayu lainnya									
	16214	Industri veneer									
	16215	Industri kayu laminasi									
	16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu									
	20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil									



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.21

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		pertanian	dan								
	16103	Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya	2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk - produk olahan hasil hutan bukan kayu								
	16104	Industri pengolahan rotan									
	10611	Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya									
	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.22

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		<i>leguminous</i>)	untuk skala usaha kecil.								
	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk <i>rhizoma</i>)									
	10616	Industri tepung terigu									
	10621	Industri pati ubi kayu									
	10622	Industri berbagai macam pati palma									
	10629	Industri pati									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.23

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		dan produk pati lainnya									
	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras									
	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung									
	10633	Industri tepung beras dan tepung jagung									
	10634	Industri pati beras dan									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.24

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		jagung									
	10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati									
	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan									
	10424	Industri pelet kelapa									
	10722	Industri gula merah									
	10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirup									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.25

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
	10731	Industri kakao									
	10779	Industri produk masak lainnya									
	11090	Industri minuman lainnya									
	20131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik									
	20294	Industri minyak atsiri									
	22123	Industri karet remah (<i>crumb rubber</i>)									



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.26

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
B. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN											
1.	38120	Pengumpulan limbah berbahaya	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi kegiatan: 1. Pengumpulan Limbah	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	10 Hari	5 Tahun	Seluruh	Menteri
	38220	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya								Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi	Gubernur
										Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.27

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Bahan Berbahaya dan Beracun; 2. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 3. Pengolahan						Skala Kabupaten/ Kota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.28

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Lim- bah Bahan Berba- haya dan Bera- cun; 4. Penim- bunan Lim- bah Bahan Berba- haya dan Bera- cun;								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.29

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan 5. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Limbah B3 dilakukan sesuai ketersediaan dan kemampuan								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.30

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			teknologi yang dimiliki oleh pemohon/pe-laku usaha.								

C. BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.31

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
1.	37011	Pengumpulan air limbah tidak berbahaya	Pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dan/atau kegiatan dengan kapasitas <5 M ³ /angkutan	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengangkutan Air Limbah tidak Berbahaya	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan 2. Pemeriksaan	5 Tahun	Skala Nasional	Menteri
										Skala Provinsi	Gubernur
										Skala Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.32

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
								tek- nis 1 tah un.			
2.	37012	Pengumpulan air limbah berbahaya	Pengangkutan air limbah domestik dari rumah tangga dengan kapasitas >5 M ³ /angkutan	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengangkutan Air Limbah Berbahaya	1. Pe- me- rik- sa- an ad- mi- nis- tra- si 5 hari ker-	5 Tahun	Skala Nasional	Menteri
										Skala Provinsi	Gubernur
										Skala Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.33

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan/atau air limbah usaha dan/atau kegiatan untuk semua besaran kapasitas.					ja; dan 2. Pe- me- rik- sa- an tek- nis 1 ta- hun			
3.	37021	Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya	1. Instalasi Pengolahan	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	1. Pe- me- rik- sa-	5 Tahun	Skala Nasional Skala Provinsi	Menteri Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.34

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas <50 M ³ /hari, dan/atau; 2. Insta-				Pengolahan Air Limbah tidak Berbahaya	1. an administrasi 5 hari kerja; dan 2. Pemeriksaan teknis 1 ta-		Skala Kabupaten/Kota Bupati/Walikota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.35

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			lasi Peng-ola-han Air Lim-bah (IPAL) Do-mestik terma-suk fasili-tas penun-jang-nya dengan kapasi-tas					hun			



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.36

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			mela- yani < 20.000 jiwa atau 2.000 M ³ /ha- ri.								
4.	37022	<i>Treatment</i> dan pembuangan air limbah berbahaya	1. Insta- lasi Peng- olahan Lum- pur Tinja (IPLT) terma-	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pengolahan Air Limbah Berbahaya	1. Pe- me- rik- sa- an ad- mi- nis- trasi	5 Tahun	Skala Nasional	Menteri
										Skala Provinsi	Gubernur
										Skala Kabupaten/	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.37

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			suk fasili- tas penun- jang- nya dengan kapasi- tas >50 M ³ /ha- ri, dan/ atau; 2. Insta- lasi Pengol- ahan Air Lim-					5 hari kerj a; dan 2. Pe- me- rik- sa- an tek- nis 1 ta- hun		Kota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.38

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			bah (IPAL) Do- mestik terma- suk fasili- tas penun- jang- nya dengan kapasi- tas mela- yani >2 0.000 jiwa atau								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.39

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			2.000 M ³ /hari; 3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri; 4. Instalasi								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.40

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Peng-olahan Air Lim-bah (IPAL) Terpa-du (Air Lim-bah Do-mestik dan Air Lim-bah Proses dari usaha dan/								



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.41

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			atau kegiatan).								
D. BIDANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA KAWASAN KONSERVASI											
1.	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	5 Tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.42

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			pada Kawasan Konser-vasi dapat dilakukan pada zona/blok peman-faan Taman Nasional, Taman Hutan Raya,								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.43

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan Taman Wisata Alam; 2. Meliputi kegiatan penyelidikan geologi, geofisika dan geokimia dengan penge-								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.44

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			boran sumur uji untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapat-								



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.45

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			kan perki-raan cadang-an jasa lingku-ngan panas bumi.								
2.	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Kegiat-an Peman-faan Jasa Lingku-ngan	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaa-tan Jasa Lingku-ngan Panas Bumi	25 Hari	30 Tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.46

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada Kawasan Konservasi dapat dilakukan pada zona/blok				Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan Pada Kawasan Konservasi				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.47

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; 2. Meliputi kegiatan penge-								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.48

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			boran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjang-								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.49

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			nya, serta operasi produksi panas bumi sampai menghasilkan listrik								
3.	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala mikro, untuk memanfaatkan massa	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala	25 Hari	10 Tahun	Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya skala nasional/lin-tas provinsi	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.50

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			air dengan penggunaan debit kurang dari 5 liter/detik (lima liter per detik); 2. Pemanfaatan massa air skala				Mikro Pada Kawasan Konservasi			dan Taman Buru	
										Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur
										Taman Hutan Raya skala kabupaten/kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.51

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			mikro dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.								



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.52

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
4.	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala kecil, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/detik	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Kecil Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	10 Tahun	Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya skala nasional/lintas provinsi dan Taman Buru	Menteri
										Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.53

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			sampai dengan 20 liter/detik; 2. Pemanfaatan massa air skala kecil dilakukan Taman Nasional, Taman						kabupaten/ kota	Bupati/Walikota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.54

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.								
5.	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala menengah, untuk memanfaatkan massa	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Menengah	25 Hari	10 Tahun	Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya skala nasional/lin-tas provinsi dan Taman	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.55

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/detik sampai dengan 50 liter/detik. 2. Pemanfaatan massa				Pada Kawasan Konservasi			Buru	
										Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur
										Taman Hutan Raya skala kabupaten/Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.56

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			air skala menengah dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.57

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
6.	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala besar, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 50 liter/detik.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Besar Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	10 Tahun	Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya skala nasional/lintas provinsi dan Taman Buru	Menteri
										Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.58

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			2. Pemanfaatan massa air skala besar dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya							Taman Hutan Raya skala kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.59

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan Taman Buru.								
7.	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala mikro, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan pengguna-	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Mikro Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	20 Tahun	Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya skala nasional/lintas provinsi dan Taman Buru	Menteri
										Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.60

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			an debit kurang dari 5 liter/detik (sepuluh liter per detik). 2. Pemanfaatan jasa aliran air skala mikro dilaku-						kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.61

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
8.	02209	Usaha kehutanan	kan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin	25 Hari	20 Tahun	Taman Nasional, Taman Wisata	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.62

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		lainnya	untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/detik sampai dengan 20				Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Kecil Pada Kawasan Konservasi			Alam, Taman Hutan Raya skala nasional/lintas provinsi dan Taman Buru	
										Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur
										Taman Hutan Raya skala kabupaten/	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.63

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			liter/ detik; 2. Peman- -faatan jasa aliran air skala kecil dilaku kan pada Taman Nasio- nal, Taman						kota		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.64

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.								
9.	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala menengah, untuk memanfaatkan jasa	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala	25 Hari	20 Tahun	Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya skala nasional/lin-tas provinsi dan Taman Buru	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.65

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/detik sampai dengan 50 liter/detik; 2. Pemanfaatan jasa				Menengah Pada Kawasan Konservasi			Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur
										Taman Hutan Raya skala kabupaten/kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.66

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			aliran air skala kecil dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.								



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.67

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
10.	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala besar, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Besar Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	20 Tahun	Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya skala nasional/lintas provinsi dan Taman Buru	Menteri
										Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.68

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			lebih dari 50 liter/detik;						kota		
			2. Pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan Taman Nasional, Taman						Taman Hutan Raya skala kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.69

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru;								
11.	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha pengusahaan sarana wisata alam pada	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata	30 Hari	35 Tahun	Taman Nasional, Taman Hutan Raya skala nasional/lin-tas provinsi dan Taman Wisata Alam	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.70

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			zona atau blok peman-faan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya;				Alam Pada Kawasan Konservasi				
			2. Meliputi							Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur
										Taman Hutan Raya skala kabupaten/kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.71

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			usaha Penye- diaan sarana wisata tirta, sarana ako- mo- dasi, sarana trans- por- tasi, sarana trans- portasi khu- sus								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.72

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			(helicopter, seaplane, ultralight, submarine, catamaran boat) dan sarana wisata petualangan alam;								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.73

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
12.	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha penyediaan jasa wisata alam pada Suaka Margasatwa,	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Wisata Alam Pada Kawasan	5 Hari	5 Tahun	Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya skala nasional/lin-tas provinsi dan Taman Wisata Alam	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.74

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya; 2. Penyediaan jasa wisata alam antara lain kegiatan-				Konservasi				
										Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur
										Taman Hutan Raya skala kabupaten/kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.75

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			an usaha Infor- masi pari- wisata alam, Pra- mu- wisata / In- ter- preter Wisata Alam, Trans- portasi Wisata Alam,								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.76

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Perja- lanan Wisata Alam, Cinde- ramata Wisata Alam, Makan- an dan minum- an Wisata Alam, Perse- waan peralat- an								



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.77

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			wisata alam;								
13.	02209	Usaha kehutanan lainnya	Penyediaan massa air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga, irigasi atau kepentingan sosial di sekitar Taman Nasional, Taman Wisata	UMKM	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Lingkungan Air Pada Kawasan Konservasi	10 Hari	5 Tahun	Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya skala nasional/lintas provinsi dan Taman Buru	Menteri
										Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.78

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah		
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota	
				Skala Usaha	Luas Lahan							
			Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa dan Taman Buru;							kabupaten/kota		
										Taman Hutan Raya skala kabupaten/kota	Bupati/Walikota	
14.	02209	Usaha kehutanan lainnya	Penyediaan jasa aliran air untuk pembangunan pembangkit listrik	UMKM	N/A	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar Penyediaan Jasa	+	10 Hari	5 Tahun	Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya skala	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.79

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			tenaga mikro-hidro dan pembangkit listrik tenaga minihidro untuk pemenuhan listrik rumah tangga dan kepentingan sosial di sekitar Taman Nasional, Taman				Lingkungan Energi Air Pada Kawasan Konservasi			nasional/lintas provinsi dan Taman Buru	
										Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/Kota	Gubernur
										Taman Hutan Raya skala kabupaten/	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.80

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa dan Taman Buru;							Kota	
15.	02209	Usaha kehutanan lainnya	Kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana perburu-	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pengusahaan Taman Buru	30 Hari	30 Tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.81

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			an serta kegiatan berburu di Taman Buru.								
E. PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR											
1.	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Bentuk Lembaga Konservasi untuk kepentingan umum	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Umum	20 Hari	25 Tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.82

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			meli- puti Taman Safari, Kebun Bina- tang, Taman Satwa, Taman Satwa Khu- sus, Kebun Botani, Herba- rium, Muse- um								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.83

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Zoo- logi, Taman Tum- buhan Khu- sus; 2. Lem- baga Kon- servasi mem- punyai fungsi utama seba-								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.84

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			gai tempat pengembangan terkontrol dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa liar dengan								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.85

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Selain fungsi utama Lembaga Konservasi juga mempunyai								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.86

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			fungsi sebagai tempat pendidikan konser-vasi, peragaan tumbuhan dan satwa liar, penitipan sementara								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.87

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			tumbuhan dan satwa liar, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi <i>in-situ</i> ;								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.88

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
2.	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Penang-karan meru-pakan upaya perba-nyakan melalui pe-ngem-bang-biakan dan pem-besar-an tum-buhan dan	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Penangkar-an Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	14 Hari	5 Tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.89

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya; 2. Penangkaran tumbuhan dan								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.90

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			satwa liar berben-tuk: a. Pe-nge mba ng-biak -an sat-wa liar, b. Pem bes-ar-an sat-								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.91

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			wa liar (Ra- nch- ing/ Re- ar- ing), c. Per- ba- nya- kan tum - buh -an se- cara bu-								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.92

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			atan dalam kondisi yang terkontrol (Artificial Propagation).								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.93

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			3. Meliputi kegiatan penanganan jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi, tidak dilin-								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.94

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			dung, <i>appendix</i> dan <i>non-appendix</i> <i>CITES</i> . Untuk tujuan peredaran, dapat dilakukan setelah memenuhi per-								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.95

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			syarat-an yang diper-lukan lain-nya;								
3.	02209	Usaha kehutanan lainnya	Peredaran <i>specimen</i> tumbuhan dan satwa liar dalam negeri adalah kegiatan mengedar-kan	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam	14 Hari	5 Tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.96

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			<i>specimen</i> tumbuhan dan satwa liar berupa mengumpulkan, membawa, atau mengangkut <i>specimen</i> tumbuhan dan satwa liar yang ditangkap atau diambil				Negeri				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.97

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			dari habitat alam atau yang berasal dari hasil penangkaran dan perolehan dari luar negeri untuk kepentingan pemanfaatan di dalam wilayah Negara								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.98

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Kesatuan Republik Indonesia;								
4.	02209	Usaha kehutanan lainnya	Peredaran <i>specimen</i> tumbuhan dan satwa liar luar negeri merupakan kegiatan mengedarkan <i>specimen</i> tumbuhan dan satwa	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri	14 Hari	5 Tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.99

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			liar berupa mengumpulkan, membawa, atau mengangkut <i>specimen</i> tumbuhan dan satwa liar yang ditangkap atau diambil dari habitat alam atau								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.100

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			yang berasal dari hasil penangkar-an dan perolehan dari luar negeri untuk kepentingan pemanfaatan keluar atau masuk wilayah Negara Kesatuan Republik								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.101

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Indonesia;								
5.	02209	Usaha kehutanan lainnya	Peragan tumbuhan dan satwa liar merupakan kegiatan memamerkan atau memper-tontonkan baik dengan atraksi maupun tidak terhadap spesimen	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	14 Hari	5 Tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.102

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah		
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota	
				Skala Usaha	Luas Lahan							
			tumbuhan dan atau satwa liar di dalam negeri maupun di luar negeri.									
F. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN												
1.	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Kelompok usaha ini mencakup kegiatan Pengadaan dan Pengedaran Benih	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran	+	15 Hari	1 Tahun	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.103

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Tanaman Hutan				Benih				
2.	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Kelompok usaha ini mencakup kegiatan Pengadaan dan Pengedaran Bibit Tanaman Hutan	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Bibit	15 Hari	1 Tahun	Seluruh	Gubernur
3.	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Kelompok usaha ini mencakup kegiatan Pengadaan dan	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	15 Hari	1 Tahun	Yang dimohon oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan (Perum	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
I.3.A.104

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Hutan				Pengadaan dan Pengedaran Benih Dan Bibit			Perhutani)	
										Yang dimohon oleh Pelaku Usaha perseorangan dan Pelaku Usaha non perseorangan.	Gubernur
4.	02140	Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan	Kelompok usaha ini mencakup kegiatan Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari Luar Negeri	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman	15 Hari	1 Tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.3.A.105

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
							Hutan Dari Luar Negeri				
5.	02140	Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan	Kelompok usaha ini mencakup kegiatan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit ke Luar Negeri	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Ke Luar Negeri	15 Hari	1 Tahun	Seluruh	Menteri